



Implementasi Sistem informasi Keluarga dalam mendukung Program Bangga kencana di Kabupaten Sidoarjo

Famela Maulidiyah Lestari¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: famelamaulidiyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 16, 2025

Revised December 30, 2025

Accepted February 05, 2026

Available online February 05, 2026

Kata Kunci:

Bangga Kencana; Implementasi Kebijakan: Kabupaten Sidoarjo; SIGA.

Keywords:

Proud Kencana; Policy Implementation: Sidoarjo Regency; SIGA.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga serta menekan risiko permasalahan kependudukan, termasuk stunting. Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sebagai basis data keluarga yang terintegrasi dan berbasis by name by address. Keberadaan SIGA menjadi penting karena menyediakan data mikro keluarga yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Keluarga dalam mendukung Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo serta menilai perannya dalam mengidentifikasi Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait, seperti organisasi perangkat daerah teknis, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, serta kader KB. Analisis dilakukan dengan menelaah tahapan implementasi SIGA, peran

dan koordinasi antar aktor kebijakan, mekanisme operasional pendataan keluarga, serta pemanfaatan data SIGA dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Bangga Kencana di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIGA di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik dan terstruktur. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan fasilitas operasional, pola sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara berjenjang, serta keterlibatan aktif kader KB dalam pendataan langsung ke keluarga. Data SIGA dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan Program Bangga Kencana, khususnya dalam penentuan sasaran keluarga berisiko stunting dan penyusunan intervensi pembangunan keluarga yang berbasis data. Secara keseluruhan, SIGA berperan penting dalam memperkuat kebijakan Bangga Kencana yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

ABSTRACT

The Family Development, Population, and Family Planning Program (Bangga Kencana) is one of the government's strategic policies aimed at improving family quality and reducing population-related challenges, including stunting. To support the implementation of this program, the National Population and Family Planning Board (BKKBN) developed the Family Information System (Sistem Informasi Keluarga / SIGA) as an integrated family database based on the by name by address approach. The existence of SIGA is crucial as it provides accurate and up-to-date micro-level family data to support evidence-based family development policies. This study aims to analyze the implementation of the Family Information System in supporting the Bangga Kencana Program in Sidoarjo Regency. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through document analysis, field observations, and interviews with relevant stakeholders, including technical local government agencies, Family Planning Field Officers (PLKB), and family planning cadres. The analysis focuses on the stages of SIGA implementation, coordination among policy actors, operational

mechanisms of family data collection, and the utilization of SIGA data in program planning, implementation, and evaluation at the local level. The findings indicate that the implementation of SIGA in Sidoarjo Regency has been relatively well-structured and effectively conducted. This is reflected in the availability of operational support, tiered socialization and training activities, and the active involvement of family planning cadres in conducting direct household-level data collection. SIGA data have been utilized as a foundation for planning the Bangga Kencana Program, particularly in targeting families at risk of stunting and designing data-driven family development interventions. Overall, SIGA plays a significant role in strengthening the implementation of the Bangga Kencana Program by promoting evidence-based policies and supporting efforts to improve family welfare.

1. PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan suatu peristiwa demografis yang sering terjadi di Indonesia. Pergeseran penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat dan dinamis pada kota maupun kabupaten yang terdampak (Ananta, 2020). Pergerakan penduduk ini mendorong adanya tekanan pada perencanaan pelayanan publik, termasuk dalam layanan kesejahteraan keluarga, layanan Kesehatan, dan perencanaan kependudukan secara umum. Salah satu masalah yang timbul dari adanya urbanisasi yakni pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat mengakibatkan adanya suatu tantangan dalam pengelolaan dan pembaruan data keluarga sehingga hal ini menjadi faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah demi kesejahteraan warganya

Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dengan sangat pesat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dalam publikasinya terkait “Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka” pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yakni sebanyak 1.955.002 jiwa (BPS, 2023). Lalu, pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yakni sebanyak 1.996.825 jiwa (BPS Sidoarjo, 2025). Sedangkan pada tahun 2025 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo yakni sebanyak 2.027.874 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025). Dapat terlihat bahwasanya setiap tahun Kabupaten mengalami laju pertumbuhan penduduk yang signifikan. Penting adanya perbaruan data secara rutin dan sistematis sehingga informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk telah menjadi perhatian utama pemerintah sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam isinya menegaskan bahwasanta pembangunan keluarga harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis data (Undang-Undang, 2009). Kerangka kebijakan tersebut kebudia dioperasikan melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) serta Program Bangga Kencana yang seluruh perencanaan dan implementasiannya dangat bergantung pada ketersediaan data keluarga yang akurat (Efiyanti et al., 2022)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan digitalisasi pelayanan publik, maka kebutuhan akan sistem pendataan keluarga secara efisien (Aulia, 2021). Maka, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan Sistem Informasi Keluarga atau SIGA sebagai instrumen digital dalam pengelolaan data keluarga. Sistem Informasi Keluarga hadir untuk

memungkinkan proses pencatatan, pemutakhiran, dan pengolahan data keluarga dilakukan secara daring dan efektif (Nurhidayah, 2022) sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika perubahan keluarga di wilayah-wilayah yang memiliki mobilitas penduduk tinggi seperti Kabupaten Sidoarjo.

Sistem Informasi Keluarga dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek salah satunya sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo terutama dalam memastikan bahwasanya pelaksanaan program dapat didasarkan pada data keluarga yang terkini sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Dengan ini, pentingnya mengaji dan menganalisis terkait implementasi system informasi keluarga dalam mendukung Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaa memastikan pembangunan keluarga yang berbasis data yang lebih akurat, mutakhir dan responsive terhadap dinamika kependudukan.

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dalam mendukung Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana proses, mekanisme serta dinamika implementasi SIGA sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif menurut Moleong (Moleong, 2017) yakni penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna dan proses sosial melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual terhadap suatu fenomena berdasarkan kondisi aktual. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo dengan lokasi penelitian meliputi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dan beberapa kecamatan, yang menjadi wilayah pelaksanaan Program Bangga Kencana. Waktu penelitian berlangsung selama Agustus hingga Desember 2025 dengan melakukan pengamatan langsung dan terlibat secara terbatas dalam aktivitas pendataan keluarga dan pengelolaan SIGA, sehingga memperkaya pemahaman terhadap proses implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Sugiyono (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, seperti dokumen, arsip, dan publikasi. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen terkait Sistem informasi Keluarga (SIGA), peraturan perundang-undangan terkait kependudukan dan keluarga berencana, serta artikel jurnal dan buku ilmiah yang membahas sistem informasi dan implementasi kebijakan publik. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis. Selain itu data primer yang digunakan yakni melalui observasi lapangan terhadap aktivitas pendataan keluarga dan pengelolaan SIGA. Wawancara dilakukan secara terbatas sebagai pelengkap untuk mengklarifikasi temuan observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

(Huberman & Miles, B., 2013). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum data yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami, selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan pola dan keterkaitan temuan penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari studi literatur, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan program nasional yang diinisiasikan oleh Kemendukbangga atau BKKBN dengan tujuan mewujudkan keluarga berkualitas dan hidup dalam lingkungan yang sehat di Indonesia, serta dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti Bina Keluarga Berencana (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Remaja (BKR) melalui pengendalian penduduk, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penguatan fungsi keluarga (BKKBN, 2024). Program ini mencakup berbagai kegiatan strategis, antara lain pelayanan keluarga berencana yang sekarang diubah menjadi keluarga berkualitas, pendataan keluarga, pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penurunan stunting, serta penguatan keluarga beresiko. Luasnya cakupan kegiatan Bangga Kencana menuntut adanya ketersediaan data keluarga yang akurat, mutakhir dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program di berbagai Tingkat pemerintahan.

Sebelum adanya Sistem Informasi Keluarga (SIGA), proses pendataan keluarga dalam program kependudukan dan keluarga berencana masih dilakukan secara manual dengan penggunaan formulir kertas (Widandary et al., 2024). Pendataan dilakukan oleh Penyuluh Lapangan keluarga Berencana (PLKB) dan kader pendata keluarga yang masing masing mendatangi warga serta mencatat informasi keluarga secara tradisional menggunakan formulir kertas yang kemudian di inputkan ke sistem pada komputer secara terpisah di kantor. Praktik ini rentan terhadap adanya lesalaham manusia (*human error*), resiko kehilangan berkas fisik, serta keterlambatan dalam pengolahan data, karena proses entri dilakukan setelah kunjungan lapangan selesai. Kondisi ini tercatat dalam berbagai kajian bahwasanya sistem informasi pendataan keluarga yang menunjukkan bahwa pendataan manual sering menghasilkan data yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu sehingga membatasi kualitas perencanaan program.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai menginisiasi pengembangan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sebagai platform digital yang terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional (Nurhidayah, 2022). SIGA adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh BKKBN untuk mendukung pendataan keluarga, pemantauan, serta pengelolaan Program Bangga Kencana secara terintegrasi melalui media digital yang dapat diakses dan diperbarui secara real time. SIGA dirancang untuk menggantikan metode manual dengan sistem yang memungkinkan pencatatan, pengelolaan, dan pemutakhiran data keluarga. Proses digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola program Bangga Kencana, yang sejak awal dirancang sebagai respons terhadap

kompleksitas perubahan sosial dan demografis di era urbanisasi dan digitalisasi. SIGA menjadi saluran utama yang menghubungkan data lapangan dengan perencanaan kebijakan, sehingga menjadikan data keluarga tidak hanya sebagai catatan administratif, tetapi sebagai masukan strategis yang dapat digunakan oleh perencana program di tingkat lokal maupun nasional.

Pembahasan

Sistem Informasi Keluarga (SIGA) adalah aplikasi digital yang dikembangkan dan dikelola oleh BKKBN sebagai basis data resmi keluarga Indonesia yang berfungsi sebagai fondasi perencanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi Program Bangga Kencana (Nurhidayah, 2022). SIGA dibangun sebagai wadah untuk seluruh data keluarga, karena dapat mencatat informasi keluarga melalui rumah ke rumah secara langsung sehingga setiap keluarga memiliki identifikasi data yang unik dan dapat dilacak dari tingkat desa sampai tingkat nasional. SIGA merupakan bentuk implementasi transformasi digital dalam sistem pendataan keluarga, yang sebelumnya dilakukan secara manual atau terpisah melalui berbagai tabel dan formulir. Sistem ini menjadi alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi demografis, perilaku keluarga berencana, profil ekonomi dan sosial keluarga, serta indikator lain yang relevan dengan target pembangunan keluarga, termasuk penurunan angka stunting. Pengembangan SIGA didorong oleh kebutuhan pemerintah akan data yang cepat terupdate, akurat, dan terintegrasi, sehingga semua kegiatan perencanaan serta evaluasi program dapat dilakukan berbasis bukti. SIGA menyatukan berbagai sumber data pembangunan keluarga sehingga meminimalkan duplikasi, mempercepat proses verifikasi, dan memungkinkan pemerintah daerah serta pusat melihat capaian program secara *real-time* (Rahmadana, 2025)

Secara operasional, SIGA digunakan oleh PLKB dan kader KB di lapangan untuk menginput data keluarga setelah melakukan kunjungan rumah atau field visit. Data yang diinput mencakup informasi demografis, status layanan KB, riwayat reproduksi, kondisi rumah tangga, serta indikator kesejahteraan dan dinamika sosial keluarga. Melalui mekanisme ini, data yang masuk ke SIGA langsung terhubung dengan basis nasional dan dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan intervensi program yang lebih tepat sasaran. Implementasi program Bangga Kencana yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) melibatkan beragam aktor kebijakan, mulai dari lembaga pusat hingga pelaksana teknis di desa/kelurahan. Distribusi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar pihak ini menjadi tulang punggung keberhasilan implementasi program secara vertikal dan horizontal. Secara struktural, aktor yang terlibat meliputi BKKBN Pusat atau Kemendukbangga, BKKBN Provinsi/perwakilan daerah, Dinas P3AKB atau Dinas Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten/kota, serta lini pelaksana teknis seperti manajer data, pengelola data, supervisor, PLKB, dan kader KB.

Dalam implementasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA), terdapat pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar tingkat pemerintahan dan pelaksana lapangan agar proses pendataan keluarga, pengelolaan data, hingga pemanfaatannya dalam Program Bangga Kencana dapat berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta tiap aktor memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dalam satu sistem kerja vertikal dari pusat hingga desa atau kelurahan.

Pada tingkat pusat, BKKBN memiliki tugas utama sebagai perumus kebijakan nasional dan pengendali sistem. BKKBN bertanggung jawab menetapkan arah kebijakan Program Bangga Kencana, menyusun pedoman teknis pendataan keluarga, serta mengembangkan dan mengoperasikan secara pusat aplikasi SIGA sebagai sistem informasi nasional. Dalam konteks implementasi, BKKBN pusat memastikan bahwa variabel data yang dikumpulkan, metode pendataan, serta standar operasional prosedur (SOP) pendataan keluarga berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. Selain itu, BKKBN pusat juga berperan dalam menyampaikan kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah melalui mekanisme koordinasi vertikal, seperti rapat koordinasi, sosialisasi nasional, serta penerbitan petunjuk teknis dan surat edaran. Dengan demikian, BKKBN pusat berfungsi sebagai regulator, fasilitator sistem, dan pengendali mutu data keluarga secara nasional.

Kebijakan yang dirumuskan oleh BKKBN pusat kemudian diturunkan dan diimplementasikan oleh BKKBN Provinsi serta Operator Perangkat Daerah (OPD) teknis di kabupaten/kota, seperti Dinas P3AKB atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. OPD memiliki tupoksi sebagai pelaksana kebijakan sekaligus koordinator lintas sektor di wilayahnya. OPD bertugas menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam rencana kerja daerah, menetapkan lokasi prioritas pendataan SIGA, serta mengalokasikan sumber daya pendukung seperti anggaran, sarana prasarana, dan dukungan operasional bagi petugas lapangan. OPD juga berperan penting dalam menyampaikan kebijakan dan arahan teknis kepada pelaksana di tingkat kecamatan dan desa melalui kegiatan sosialisasi, BIMTEK, dan workshop teknis. Selanjutnya, manajer data dan manajer pengelola yang memiliki tupoksi strategis dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem. Manajer data bertanggung jawab terhadap penerimaan, pengelolaan, dan validasi data yang masuk ke dalam SIGA. Tugas ini mencakup pemeriksaan kelengkapan data, pengecekan konsistensi isian, serta memastikan tidak terjadi duplikasi data keluarga. Manajer data juga berperan dalam menyusun laporan SIGA dan menyediakan data yang dibutuhkan oleh pimpinan OPD atau instansi lain untuk keperluan perencanaan dan evaluasi program.

Adapun tugas dari manajer pengelola memiliki fungsi lebih luas dalam mengoordinasikan pelaksanaan teknis SIGA di wilayahnya. Tupoksi manajer pengelola mencakup pengaturan alur kerja pendataan, pembagian tugas petugas lapangan, pemantauan capaian pendataan, serta penyelesaian kendala teknis maupun non-teknis yang muncul selama implementasi. Manajer pengelola menjadi penghubung antara kebijakan OPD dan pelaksanaan di lapangan, sehingga memastikan bahwa pendataan SIGA berjalan sesuai target waktu dan standar yang telah ditetapkan.

Di bawah manajer pengelola, terdapat supervisor yang berperan sebagai pengawas langsung kegiatan pendataan di lapangan. Supervisor memiliki tupoksi melakukan pemantauan terhadap kinerja PLKB dan kader KB, memberikan pendampingan teknis jika ditemukan kesulitan dalam pengisian aplikasi SIGA, serta melakukan pengecekan awal terhadap kualitas data yang dikumpulkan. Selain itu, supervisor juga berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara petugas lapangan dengan manajer data atau OPD, terutama jika ditemukan permasalahan yang memerlukan tindak lanjut kebijakan atau dukungan tambahan. Pada tingkat

pelaksana lapangan, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan kegiatan pendataan keluarga di wilayah kerjanya. PLKB bertugas mengarahkan dan membina kader KB, memastikan pelaksanaan pendataan sesuai SOP, serta membantu proses verifikasi dan pemutakhiran data keluarga. PLKB juga berperan dalam mengintegrasikan data SIGA dengan kegiatan pelayanan KB dan program pembangunan keluarga lainnya, sehingga data yang dikumpulkan tidak berhenti sebagai informasi administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk intervensi program di masyarakat. Terakhir, kader KB merupakan ujung tombak pelaksanaan SIGA di tingkat desa atau kelurahan. Tupoksi kader meliputi melakukan pendataan langsung ke keluarga melalui metode kunjungan rumah, melakukan wawancara dan pengisian data keluarga, serta menginput data tersebut ke dalam aplikasi SIGA menggunakan smartphone. Selain tugas pendataan, kader juga berperan sebagai komunikator program, yaitu menyampaikan informasi terkait Program Bangga Kencana kepada keluarga sasaran serta membantu menghubungkan keluarga dengan layanan yang tersedia. Peran kader sangat krusial karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki pemahaman kontekstual terhadap kondisi sosial keluarga di wilayahnya.

Secara keseluruhan, implementasi SIGA merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai aktor dengan tupoksi yang berbeda namun saling terkait. Pembagian tugas yang jelas ini memungkinkan SIGA berfungsi tidak hanya sebagai sistem informasi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola data keluarga yang mendukung perencanaan dan evaluasi Program Bangga Kencana secara efektif dan berkelanjutan.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Sosialisasi SIGA

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo sangat strategis dalam mendorong implementasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di tingkat lokal. Dinas ini memegang peran sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan nasional di daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi, pembekalan teknis, serta pembinaan terhadap para aktor pelaksana lapangan seperti PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), kader KB, manajer data, dan operator aplikasi SIGA. Dalam praktiknya, Dinas P3AKB menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan orientasi SIGA yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan fungsional atas aplikasi ini di semua level pelaksana. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya ditujukan bagi PLKB dan kader KB, tetapi juga bagi manajer data, supervisor, serta pengambil keputusan di tingkat kecamatan dan desa. Seperti pada pelaksanaan di Kabupaten Sidoarjo, Dinas P3AKB bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi pemutakhiran data keluarga dilakukan sesuai standar nasional sehingga data yang terinput akurat dan dapat dipakai untuk perencanaan program Bangga Kencana. Ini menunjukkan peran dinas di Kabupaten Sidoarjo dalam menyiapkan SDM lokal agar mampu memanfaatkan aplikasi data dengan benar dan konsisten. (Kota Pariaman) Selain itu, sebagian besar kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Dinas P3AKB mengandung bimbingan teknis (Bimtek), evaluasi dan pertemuan koordinasi yang melibatkan berbagai stakeholder seperti manajer data, pengelola SIGA di kecamatan, dan PLKB. Hal ini dilakukan untuk melatih penggunaan Sistem Informasi Keluarga sehingga penyuluh KB di semua tingkatan dapat memenuhi pelaporan hasil kegiatan

melalui aplikasi ini secara efektif, yang pada akhirnya memperkuat kualitas dan akurasi data keluarga di tingkat kabupaten. (Banjarkab)

Tahap Implementasi SIGA di Kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan pendataan keluarga menggunakan SIGA mengikuti urutan kegiatan yang bersifat berjenjang, dimulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Sistem ini pada dasarnya dikembangkan untuk menggantikan metode manual lama dengan pendekatan digital yang terintegrasi, sehingga pendataan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akurat.

1. Perencanaan dan Persiapan

Tahap ini melibatkan penetapan wilayah sasaran, jumlah keluarga yang akan didata, persiapan pelatihan SDM, serta pengadaan perangkat teknologi seperti smartphone atau tablet yang akan digunakan PLKB dan kader di lapangan. Pada tahap awal ini, Dinas P3AKB bersama BKKBN Provinsi biasanya menyusun timeline tahunan sehingga kegiatan pendataan dapat dilaksanakan secara sistematis. Rencana tahunan umumnya mencakup jadwal sosialisasi, Bimtek, serta jadwal teknis kunjungan rumah oleh kader.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

Sebelum penginputan data keluarga oleh kader, sosialisasi aplikasi SIGA serta pelatihan teknis menjadi kebutuhan utama. Pada fase ini, peserta dilatih cara mengoperasikan aplikasi SIGA, memahami struktur data, prosedur penginputan, serta mekanisme verifikasi data. Pelatihan SIGA merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ditujukan bagi pengelola dan pelaksana Sistem Informasi Keluarga, agar memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga petugas di lini lapangan, sehingga seluruh aktor pelaksana memiliki pemahaman dan keterampilan yang seragam dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIGA (Nur & Wardani, 2022).

3. Pengumpulan dan Pencatatan Data

Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dirancang untuk menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi riil keluarga di setiap wilayah. Oleh karena itu, penataan data oleh kader dilakukan secara terstruktur melalui penetapan wilayah sasaran, pembagian unit kerja, serta penerapan metode *by name by address*. OPD bersama tim pendataan menetapkan desa atau kelurahan prioritas berdasarkan kriteria strategis seperti tingginya prevalensi stunting, kerentanan sosial ekonomi, atau belum lengkapnya data sebelumnya. Wilayah kerja kemudian dibagi ke dalam lingkup RW/RT, dan kader KB diberikan target jumlah keluarga yang harus didata dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan fasilitas, sehingga pendataan dapat berjalan fokus, terukur, dan efisien.

Kader melakukan kunjungan rumah untuk melakukan wawancara langsung dengan keluarga sasaran, kemudian menginput hasil pendataan tersebut ke dalam aplikasi SIGA menggunakan smartphone atau perangkat yang tersedia. Proses penginputan ini mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan oleh BKKBN agar data dapat terintegrasi secara nasional dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan serta pelaksanaan Program Bangga Kencana yang berdasar data faktual. Pada fase ini, PLKB dan kader KB melakukan kunjungan rumah,

mengumpulkan data keluarga melalui wawancara langsung, kemudian menginput data itu ke dalam aplikasi SIGA menggunakan perangkat digital. Pengisian Sistem Informasi Keluarga (SIGA) oleh kader KB dan PLKB tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pendataan administratif, melainkan sebagai proses strategis untuk mengidentifikasi kondisi keluarga secara menyeluruh dan mendukung pencapaian tujuan Program Bangga Kencana, khususnya dalam penurunan risiko stunting dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada keluarga sasaran memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menyusun intervensi pembangunan keluarga. Pendataan keluarga mencakup data demografis, status pelayanan KB, indikator keluarga berencana, hingga variabel pembangunan keluarga seperti kondisi rumah, aset, dan aspek kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan kewajiban aplikasi SIGA yang harus memuat data keluarga secara lengkap dan terpadu untuk mendukung intervensi program.

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Validasi Data

Setelah data dikumpulkan oleh kader, proses berikutnya adalah pemeriksaan dan validasi oleh manajer data dan supervisor di tingkat kecamatan atau kabupaten. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang masuk bersih dari kesalahan teknis, lengkap sesuai pedoman variabel yang sudah ditetapkan, serta siap dipakai untuk keperluan perencanaan atau evaluasi. Pelaksanaan validasi ini kerap dilakukan secara berkala selama fase pendataan.

5. Monitoring & Evaluasi (Monev)

Ketika fase pengumpulan data selesai dalam kurun waktu tertentu, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap cakupan pendataan dan kualitas input data. Kegiatan ini dilakukan oleh tim di OPD bersama BKKBN Provinsi untuk menilai apakah pendataan berjalan sesuai target dan pedoman teknis. Hasil monitoring juga menjadi dasar untuk perbaikan pelaksanaan pada periode berikutnya.

Mekanisme Pengumpulan Data Keluarga dalam Sistem Informasi Keluarga

Pada tahap awal pendataan, kader melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga dan mengisi data dasar keluarga dan individu melalui aplikasi SIGA menggunakan smartphone. Data yang dikumpulkan mencakup jumlah dan susunan anggota keluarga, jenis kelamin, tanggal lahir, status perkawinan, usia pertama kawin, kepemilikan akta kelahiran, hubungan dengan kepala keluarga, serta latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Data ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi struktur demografis keluarga, tingkat ketertiban administrasi kependudukan. Variabel seperti usia pertama kawin dan tingkat pendidikan memiliki korelasi kuat dengan risiko stunting, karena perkawinan usia dini dan rendahnya pendidikan orang tua sering dikaitkan dengan rendahnya pengetahuan gizi, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan anak.

Selanjutnya, pengisian SIGA berlanjut pada aspek keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu pilar utama Program Bangga Kencana. Dalam praktik lapangan, pertanyaan pada bagian ini diajukan kepada pihak perempuan atau ibu dalam keluarga, karena berkaitan langsung dengan riwayat kehamilan dan persalinan. Kader mencatat berapa kali ibu melahirkan, jumlah anak yang dianggap ideal oleh keluarga, apakah ibu sedang hamil, serta apakah pasangan masih menginginkan anak tambahan. Informasi ini kemudian

dikaitkan dengan penggunaan alat dan metode kontrasepsi, termasuk jenis kontrasepsi yang digunakan, riwayat penggunaan KB, serta alasan keluarga tidak menggunakan KB apabila ditemukan. Selain itu, sumber pelayanan KB juga dicatat, apakah berasal dari puskesmas, rumah sakit, bidan, atau apotek. Data ini dapat dimanfaatkan untuk memetakan Pasangan Usia Subur (PUS), menentukan target akseptor KB, serta merencanakan distribusi layanan dan alat kontrasepsi. Dari perspektif analisis kebijakan, variabel-variabel tersebut menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi keluarga berisiko stunting, karena kehamilan berulang dengan jarak kelahiran yang pendek, kehamilan yang tidak direncanakan, serta rendahnya partisipasi KB berpotensi meningkatkan risiko kekurangan gizi pada ibu dan anak.

Tahap berikutnya dalam pengisian SIGA yakni aspek pembangunan keluarga yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Dalam praktik di lapangan, kader menanyakan kebiasaan keluarga dalam menjalankan ibadah sebagai indikator ketahanan spiritual, kepemilikan buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan, serta dinamika hubungan antar anggota keluarga, termasuk frekuensi konflik dan bentuk konflik yang terjadi. Data ini penting untuk menggambarkan stabilitas sosial dan emosional dalam keluarga, yang secara tidak langsung memengaruhi pola pengasuhan anak dan kualitas tumbuh kembang mereka. Selain itu, Aspek kesejahteraan ekonomi keluarga juga digali melalui pertanyaan mengenai jumlah anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan, kecukupan konsumsi makanan, serta kepemilikan aset seperti rumah dan aset produktif lainnya. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan keluarga dan menentukan keluarga yang membutuhkan pendampingan lanjutan. Data ini dapat dijadikan sebagai sumber indikator kunci dalam menentukan keluarga berisiko stunting, karena keterbatasan ekonomi, kondisi kesehatan yang buruk, dan pola pengasuhan yang tidak optimal merupakan faktor determinan stunting.

Terakhir, SIGA juga memuat data terkait kondisi fisik tempat tinggal keluarga, seperti jenis rumah yang ditempati, sumber penerangan, sumber air bersih, dan sanitasi. Dalam praktik lapangan, informasi ini diperoleh melalui observasi langsung kader saat melakukan kunjungan rumah. Data tersebut sangat penting dalam analisis kebijakan karena lingkungan tempat tinggal yang tidak layak dan akses terbatas terhadap air bersih serta sanitasi yang memadai merupakan faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting dan rendahnya kualitas kesehatan keluarga. Dengan demikian, implementasi SIGA di lapangan membentuk satu rangkaian proses yang saling terhubung antara pendataan, pengelolaan data, dan pemanfaatan data untuk perencanaan kebijakan. SIGA tidak hanya menyediakan data mikro tingkat keluarga, tetapi juga menjadi alat analisis makro bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memetakan tingkat kesejahteraan keluarga dan prevalensi keluarga berisiko stunting di suatu wilayah. Dalam kerangka Program Bangga Kencana, data SIGA memungkinkan pemerintah menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berbasis bukti, sehingga tujuan pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera dapat dicapai secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan data, implementasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dalam mendukung Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo dapat dinilai telah berjalan cukup baik dan menunjukkan arah kebijakan yang semakin berbasis data. SIGA tidak lagi berfungsi sekadar sebagai alat pendataan administratif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang mampu menggambarkan kondisi riil keluarga secara mikro dan terintegrasi, khususnya dalam mengidentifikasi keluarga berisiko stunting dan tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan di tingkat pusat dengan praktik implementasi di tingkat daerah.

Kekuatan utama implementasi SIGA di Kabupaten Sidoarjo terletak pada keterpaduan peran antar aktor kebijakan, mulai dari BKKBN pusat dan provinsi, OPD teknis di kabupaten, hingga PLKB dan kader KB di tingkat desa dan kelurahan. Pola sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan secara vertikal serta dukungan fasilitas operasional yang relatif memadai telah membantu memastikan bahwa SIGA dapat dijalankan secara konsisten di lapangan. Selain itu, penggunaan metode by name by address (BNBA) serta pendataan langsung oleh kader melalui kunjungan rumah memperkuat validitas data dan meningkatkan kepercayaan terhadap SIGA sebagai basis perencanaan program Bangga Kencana.

Meskipun demikian, implementasi SIGA masih dihadapkan pada tantangan yang bersifat struktural dan teknis, seperti ketergantungan pada kapasitas sumber daya manusia, kebutuhan pembaruan data yang berkelanjutan, serta konsistensi kualitas input antar wilayah. Tantangan ini tidak serta-merta menunjukkan kegagalan kebijakan, tetapi justru menegaskan bahwa SIGA merupakan sistem dinamis yang memerlukan penguatan berkelanjutan agar benar-benar mampu menjawab kompleksitas persoalan kependudukan dan pembangunan keluarga. Secara keseluruhan, SIGA telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pergeseran kebijakan Bangga Kencana ke arah yang lebih responsif, terukur, dan berbasis bukti, meskipun masih membutuhkan penyempurnaan dalam praktik implementasinya.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam analisis pemanfaatan data SIGA dalam pengambilan keputusan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, kajian lanjutan dapat menyoroti kesiapan sumber daya manusia dan dukungan teknologi dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan data Sistem Informasi Keluarga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A. (2020). Prospek Mega-Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 (the Outlook of Mega-Demography Toward Indonesian Golden Era 2045). *Jurnal Kependudukan Indonesia* |, 15(Desember), 119-132.
- Aulia, P. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government. *Kinerja*, 18(4), 502-512. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2042>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025. *Badan Pusat Statistik*, 470.
- BKKBN. (2024). *PPKBD : Pembinaan Program Bangga Kencana - Memperkuat sistem*

- informasi keluarga, pengembangan smart technology dan advokasi. https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/912688/ppkdbd-pembinaan-program-bangga-kencana-memperkuat-sistem-informasi-keluarga-pengembangan-smart-technology-dan-advokasi?utm_source=chatgpt.com
- BPS. (2023). *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023*.
- BPS Sidoarjo. (2025). *Sidoarjo dalam Angka 2024*. 41.
- Efiyanti, E., Indarti, S., & Warlina, L. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Promosi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Melalui Media Online Terhadap Pengetahuan Remaja Di Kota Banda Aceh. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 150–159. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.271>
- Huberman, M., & Miles, B., M. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nur, T., & Wardani, R. (2022). Pelatihan Sistem Informasi Keluarga (SiGA) Terhadap Kemampuan Dan Kepatuhan Bidan Jejaring Terhadap Pencatatan Dan Pelaporan. *Jurnal Kesehatan*, 7(2), 346–352.
- Nurhidayah. (2022). Sistem Informasi Data Keluarga (Siga) Berbasis Website Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara. *Journal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi (JIRSI)*, 40–50.
- Rahmadana, A. R. O. (2025). *Implementasi Governansi Digital Di Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga: Analisis Transformasi Kebijakan Menuju Optimalisasi Bonus Demografi Indonesia Alfa Rehan Oktor Rahmadana 1**.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG*.
- Widandary, S., Hendri, M., & Wati, S. L. (2024). Sistem Informasi Pendataan Penduduk Program Keluarga Berencana pada Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Berbasis Web. *Jurnal Informatika Logika*, 1(2), 1–6.